

## **Hubungan Tingkat Pendidikan dan Kepadatan Penduduk dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Ilegal di Kota Tembilahan**

**Annisa Nur'alifa<sup>1)</sup>, Jecky Asmura<sup>2)</sup>, David Andrio<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan,

<sup>2)</sup>Dosen Teknik Lingkungan

Program Studi Teknik Lingkungan S1, Fakultas Teknik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Panam,  
Pekanbaru 28293

E-mail: annisanuralifa08@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Tembilahan is the capital city of Indragiri Hilir, it has 67.74 km<sup>2</sup> area and has 89,404 population. The amount of garbage which has been increasing as long as the growth population. Social factors that influence waste management are factor of education and factor population density. The purpose of this study is to analyze the relationship between level education and population density towards illegal dumping. This research was conducted with a survey method directly to the study area. The result were The education level of respondents towards illegal dumping increased as the increasing number of high school graduation respondents. Based on the histogram of population density comparison to the number of illegal dumping, high and low population density doesn't affect the number of illegal dumping.*

**Keywords :** *Ilegal dumping, level education, population density*

### **1. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan menurut SNI 19-2454-2002 sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Kota Tembilahan merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Indragiri

Hilir. Luas wilayah Kota Tembilahan 67.74 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 89.404 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018).

Sahil dkk, 2016 menyatakan jumlah sampah setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya dan disertai juga kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Menurut

(Akbar, 2018) meningkatnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan semakin luasnya wilayah pemukiman masyarakat yang mengakibatkan sulit terjangkaunya fasilitas pelayanan pengelolaan sampah yang telah difasilitasi oleh pemerintah setempat, salah satunya adalah fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 81 Tahun 2012 Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Berdasarkan hasil analisa pendahuluan, masih banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya.

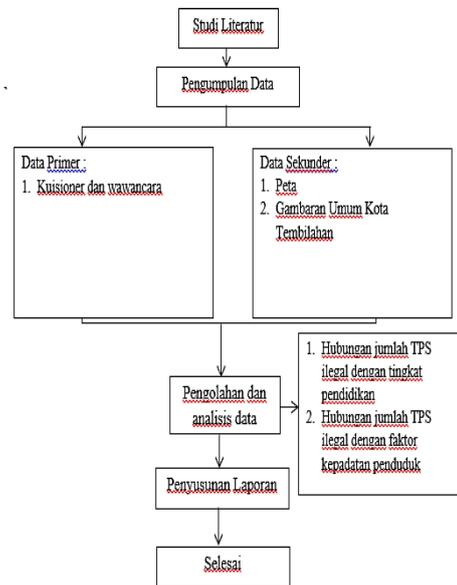
### Tujuan Penelitian

1. Menganalisis hubungan tingkat pendidikan terhadap TPS ilegal
2. Menganalisis hubungan kepadatan penduduk terhadap TPS ilegal

## 2. METODE PENELITIAN

### A. Alat dan Instrumen Penelitian

Alat dan Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Alat dan Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peta dasar wilayah Kota Tembilahan dan kuesioner.



Gambar 1. Diagram alir penelitian

### B. Kriteria TPS Ilegal

Kriteria TPS ilegal yang digunakan adalah tempat dimana masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya walaupun dilakukan pengangkutan. Data karakteristik kepadatan penduduk dan tingkat pendidikan diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Responden yang dituju adalah kepala keluarga. Penyebaran kuesioner dilakukan dalam radius 300 m dari TPS ilegal yang ditemukan (Mizwar dan Kartini, 2016).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kepadatan Penduduk

Parameter kepadatan penduduk, berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di

Perkotaan,

Klasifikasi	Kepadatan (Jiwa/Ha)			
Kawasan				
Kepadatan Penduduk	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Padat
	<150	151-200	201-400	>400

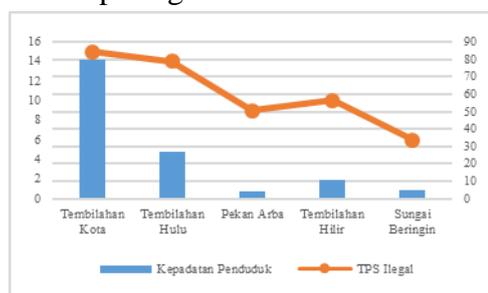
Tabel 1. Klasifikasi Kepadatan Penduduk

Jenis kepadatan penduduk pada setiap Kelurahan di Kota Tembilahan diklasifikasikan sebagai kepadatan penduduk rendah. Berikut data kepadatan penduduk di wilayah Kota Tembilahan.

No	Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)	Kategori
1.	Tembilahan Kota	15	26.848	334	80 jiwa/ha	Rendah
2.	Tembilahan Hulu	14	26.888	100	27 jiwa/ha	Rendah
3.	Pekan Arba	9	8.324	1911	4 jiwa/ha	Rendah
4.	Tembilahan Hilir	10	16.880	1457	11 jiwa/ha	Rendah
5.	Sungai Beringin	6	10.464	2072	5 jiwa/ha	Rendah
	Jumlah	54	89.404	5874	368	

Tabel 2. Kepadatan Penduduk Kota Tembilahan

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk tersebut, dapat dikaitkan dengan jumlah TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Histogram Perbandingan Kepadatan Penduduk dengan Jumlah TPS Ilegal

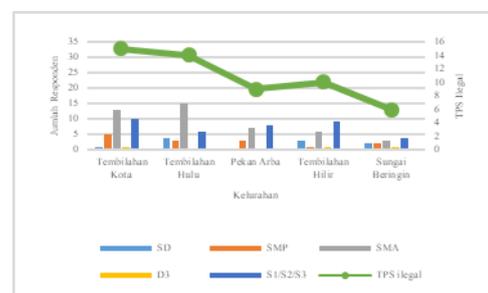
Hubungan kepadatan penduduk dengan banyaknya titik TPS ilegal di Kota Tembilahan

menjadi fluktuatif, hal ini sejalan dengan penelitian (faradilla, 2018) yang menyatakan hubungan kepadatan penduduk dengan banyaknya titik TPS ilegal menjadi fluktuatif, yang berarti banyaknya lokasi TPS ilegal Kota Tembilahan tidak hanya berpengaruh dari kepadatan penduduk yang ada di daerah tersebut saja.

## B. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses dengan metode-metode tertentu, sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan analisis data di Kota Tembilahan dihasilkan responden berpendidikan SD 10 (9%), SMP 14 (13%), SMA 44 (41%), D3 3 (3%), dan S1/S2/S3 37 (34%).

Berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan tersebut, dapat dikaitkan dengan TPS ilegal seperti gambar 6.



Gambar 3. Histogram Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Jumlah TPS Ilegal.

Faktor pendidikan tidak berpengaruh dengan jumlah TPS ilegal yang ada di Kota Tembilahan.

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap, sehingga responden yang memiliki pendidikan tinggi memiliki perilaku yang baik dalam pengelolaan sampah, sedangkan tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang kurang akan meningkatkan sikap dan perilaku yang tidak sehat. Tetapi pendidikan yang tinggi tidak menjamin perilaku pengelolaan sampahnya baik, hal ini diperkirakan karena kurangnya kesadaran akan pengelolaan sampah, malas dan tidak mau kerepotan dengan permasalahan sampah (Sari dan Mulasari, 2017).

#### 4. KESIMPULAN

Kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap jumlah TPS ilegal. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh karena pendidikan yang tinggi tidak menjamin perilaku pengelolaan sampahnya baik, karena kurangnya kesadaran akan pengelolaan sampah, malas dan tidak mau kerepotan dengan permasalahan sampah.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, I., Putra, H.P., dan Wacano, D. 2018. Pemetaan Tempat Pembuang Sampah Ilegal Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kota Yogyakarta. *Skripsi Teknik Lingkungan FTSP*, Universitas Islam Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18. (2008). *Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Badan Standarisasi Nasional. (2002). *SNI 19-2454-2002 Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional

Badan Pusat Statistik Indragiri Hilir. 2018. *Kecamatan Tembilahan dalam Angka 2018*. BPS Kota Pekanbaru.

Sahil, J, dkk., (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. *Jurnal BIOeduKasi Vol 4 No (2) Maret 2016*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81. (2012). *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mizwar, A. 2016. Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Pemetaan Sebaran Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. *Jurnal Enviro Scientiae*, 2(1):13-2

Badan Standarisasi Nasional. (2004). *SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Faradilla, R., Putra, H. P., dan Wacano, D. 2018. Pemetaan Tempat Penampungan Sampah Ilegal Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Wilayah Perkotaan

Kabupaten Bantul. *Tugas Akhir* Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sari, N., Mulasari, S.A. 2017. Pengetahuan Sikap dan Pendidikan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta. *Jurnal Medika Respati*, 12(2):74-84